

TRANSFORMASI NU DI INDONESIA: UPAYA MENGHILANGKAN POLEMIK DI TENGAH PERUBAHAN POLITIK

Hartati dan Hambali

Pemikiran Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,

Banda Aceh, Indonesia & Universitas Serambi Mekkah

Email: harta_t@yahoo.com & hambali_nurin@yahoo.com.com

Diterima tgl, 10-02-2018, disetujui tgl 05-03-2018

Abstract: This article looks at the power actors and the political elites, who always have a position, strategic and nominations in the course of the nation's history, which often have the power to direct and designing the history of the nation. The emergence of a modernist discourse on Nahdlatul Ulama (NU) is very concerning. NU regarded as a political organization has no significant role to play down organizing political change and the substitution of elite political power actors directly. Because the domain of thinking than often become conservative, countrified, superstitious, think old-fashioned, opportunistic chameleon, inconsistent, corrupt, cultured syncretic and other. Internally, NU as experienced a 'stagnation of thought'. At the same time, it has not yet found a vision regarding the role and contribution of NU to Indonesia in the global context. Nu as an organization that has abundant millennial generations, certainly has a very strategic role in the effort to create a golden Indonesia 2045. Efforts are needed to explore things in the tradition that can support transformation. NU must be able to concentrate itself on taking care of people's problems in the social, community, education, health, empowerment, economic, religious, politics, and so on, which may be more fundamental for the Indonesian people.

Abstrak: Artikel ini membahas aktor-aktor kekuasaan dan elit politik, yang selalu memiliki posisi, strategis, dan nominasi dalam perjalanan sejarah bangsa, yang sering memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan merancang sejarah bangsa. Munculnya wacana modernis mengenai Nahdlatul Ulama (NU) sangatlah miris. NU dianggap sebagai organisasi politik tidak mempunyai peran yang signifikan untuk turut mengatur perubahan politik dan pergantian aktor-aktor kekuasaan dan elit-politik secara langsung. Hal ini dikarenakan ranah berfikir yang sering menjadi konservatif, kampungan, percaya takhyul, berfikir kuno, oportunis, berwatak bunglon dan plin-plan, korup, berbudaya sinkretis, dan lainnya. Secara internal NU seperti mengalami 'stagnasi pemikiran'. Pada saat yang sama, belum menemukan visi terkait bagaimana peran dan kontribusi NU terhadap Indonesia dalam konteks perculatoran global. Nu sebagai organsasi yang memiliki generasi millennial berlimpah, tentu memiliki peran sangat strategis dalam upaya mewujudkan Indonesia emas 2045. Diperlukan ikhtiar untuk menggali hal-hal dalam tradisi yang bisa mendukung transformasi. NU harus mampu mengkonsentrasikan diri untuk mengurus persoalan-persolan umat di bidang sosial, masyarakat, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, ekonomi, keagamaan, politik dan sebagainya, yang mungkin lebih fundamental bagi bangsa Indonesia.

Keywords: NU, Transformasi, Polemik, Politik.

Pendahuluan

Gerakan pembaharuan dalam Islam atau *tajdid* sebenarnya sudah sejak lama muncul pasca periode akhir masa pemerintahan khalifah Ali bin abi-Thalib (abad 3 H), yang juga menandai berakhirnya masa *Kurafaurreasyidin* dan munculnya dinasti Muawiyah.¹

Kelahiran *Nahdatul Ulama* (NU) diawali suatu proses yang panjang sebelumnya. Bermula dari munculnya gerakan *nasionalisme* yang antara lain ditandai berdirinya Serikat Islam (SI), sebelumnya bernama SDI (Serikat Dagang Islam).² Hal ini telah mengilhamkan sejumlah pemuda pesantren yang bermukim di Mekkah untuk mendirikan cabang penghimpunan itu di sana. Belum sempat berkembang mereka segera kembali karena pecah perang dunia I berakhir.³

Namun obsesi mereka masih terus berlanjut setelah mereka menetap kembali ke Tanah Air. Mereka menghimpun *Nahdhatul Watan* (1914), *Taswir –Rul Afkar* (1918) dan penghimpunan koperasi *Nadhatul Tujjar* (1918) dan beberapa pembentukan lainnya, hingga akhirnya terbentuk NU. Motif utama yang mendasari gerakan para ulama membentuk NU ialah aspek keagamaan sebagai *jihāt fi sabilillah*. Aspek kedua yang mendorong mereka ialah tanggung jawab pengembangan pemikiran keagamaan yang ditandai upaya pelestarian ajaran mazhab *Ahlussunnahwaljama'ah* dari Muhammadiyah dengan gerakan pembaharuan. Ini tidak berarti statis, tidak berkembang, sebab pengembangan yang dilakukan justru bertumpu pada akar kesejarahan sehingga pemikiran yang dikembangkan itu memiliki konteks historis. Aspek ketiga ialah dorongan untuk mengembangkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, sosial dan ekonomi.⁴

NU yang selama ini dianggap sebagai organisasi tradisional dengan basis pesantren justru memperlihatkan gairah progresivitas berpikir, dibandingkan dengan organisasi modern yang malah tampak stagnan dan resisten. Kitab kuning yang telah ditulis ulama berabad-abad lalu dan dijadikan salah satu referensi utama *Nahdhiyin* ternyata justru

¹Khoiro, Ummatin, *Sejarah Islam dan Budaya Lokal; Kearifan Islam atas Tradisi Masyarakat*. (Kalimedia: Yogyakarta, 2015), Hal. 72

²Sarekt Islam (SI) didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1912 tumbuh dari organisasi yang mendahuluinya yang bernama Sarekat Dangan Islam (SDI). Pendiri Sarekat dangan Islam, Kiyai Haji Samanhoeidhi, pada tanggal 16 Oktober 1905 dan Sarekat Islam persis setahun kemudian, (Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*), Hal: 115.

³ Menyebabkan daulah Usmaniyah Goncang, sedangkan kekuasaan Sultan Turki yang juga dipandang sebagai Khalifah, termasuk oleh kaum Muslimin di Indonesia, diperebutkan oleh nasionalis Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal. Dalam tahun 1922 Majelis Raya Turki menghapuskan kekuasaan Sultan dengan menjadikan negeri itu suatu republik, tetapi pada tahun itu majelis tersebut menjadikan Abdul Majid khalifah tanpa kekuasaan duniawi. Dua tahun kemudian majelis itu mengapuskan khilafah sama sekali. Perkembangan ini menimbulkan kebingungan pada dunia Islam umumnya, yang mulai berfikir tentang pembentukan suatu khilafah baru. Masyarakat Islam Indonesia bukan saja berminat dalam masalah ini, malah merasa berkewajiban memperbincangkan dan mencari penyelesaiannya. Kebetulan Mesir bermaksud mengadakan kongres tengang khilafah pada bulan Maret 1924, dan sebagai sambutan atas maksud ini suatu Komite Khilafah didirikan di Surabaya tanggal 4 Oktober 1924 dengan ketua Wondosudirjo (yang dikenal dengan nama Wondoamineso) dari Sarekat Islam dan wakil ketua K.H.A Wahab Hasbullah (Delian Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*), Hal: 242.

⁴ M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1994). Hal. 313-315

membuka wawasan yang membentang luas dalam mencermati perubahan sosial. Pemahaman agama bergerak tidak lagi secara tekstualis, tetapi kontekstual.⁵

Seiring perkembangan zaman NU juga mengalami perkembangan dan tantangan tersendiri yang sangat berat dihadapinya selama ini di tinjau dari masa kelahirannya puluhan tahun silam. Wajah NU belakangan kian berubah sesuai proses yang dilaluinya beserta kondisi politik yang mewarnai dinamika NU, baik secara intern maupun ekstern. Hal ini tidak luput dari kebanjiran beberapa paham keagamaan yang berfikir secara krusial bertentangan dengan paham *Ahlul Sunnah wal Jamaah* (Aswaja) yang di anut oleh NU, yaitu: Syiah, Wahabi, Hizbul Tahrir dan Jaringan Islam Liberal. Mirisnya mereka muncul dalam rentan waktu yang hampir bersamaan untuk mendobrak NU beramai-ramai!. Oleh sebab sifat negatif yang di miliki NU membawa kemaslatan rakyat. Seperti konservatif, kampungan, percaya takhyul, tidak punya harapan, kuno, taklid buta, bernalar dangkal, oportunistis di bidang politik, berwatak bunglon dan plin-plan, korup, berbudaya sinkretis, dan cap-cap minor lainnya.⁶

Dalam tulisan ini penulis ingin berusaha untuk memberikan kontribusi dalam dunia masyarakat terhadap gerakan pembaharuan NU selama ini dengan perspektif dan analisis isu-isu yang berkembang di Indonesia. Dalam hal ini, penulis memilih tema transformasi NU di Indonesia: upaya menghilangkan polemik di tengah perubahan politik. Adapun maksud yang ingin dibahas adalah kebijakan keputusan yang tidak relevan dengan ajaran visi dan misi yang di terapkan oleh NU, sehingga menjadi problema bagi masyarakat (terutama kaum muslimin) terhadap konsep ajaran NU.

Penulis melihat bahwa perbedaan mendasar antara wacana yang didominasi modernis dan wacana yang menghormati tradisi adalah bahwa yang terakhir lebih cenderung memahami NU melalui sudut pandang organisasi itu sendiri dari penerapan kriteria non-tradisional. Di tengah problema yang dialami NU itu tidak sedikit warga *nahdliyyin*, khususnya kaum muda, yang terpukau dengan paparan dalil dan argumen yang mereka kemukakan, lantas menyakini jawaban mereka dan kemudian menaruh sinis terhadap ajaran-ajaran amalan keagamaan NU di mana asal muasal nya lahir dan tumbuh. Hal yang disayangkan jika di biarkan tanpa tindakan akan berdampak negatif terhadap dasar NU dan Aswaja kedepan. Sebagaimana mestinya itu kerjasama sangat lah penting supaya NU tetap eksis dengan misi moderen, struktural dan kultural. Namun yang menjadi fokus utama penulis sampaikan dalam tulisan ini adalah: perkembangan dan hasil transformasi NU yang berkembang dari masa kemunculan hingga sekarang serta polemik yang terjadi di Indonesia.

⁵ Sunarto, A. *Paradikma Nahdlatul Ulama Terhadap Modernisasi*, (Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3, No.2, Oktober 2013, ISSN: 2089-0192). Hal. 59, lihat hasil penelitian Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah*, 185.

⁶ A. Qodri A. Azizy, dkk. *Jejak-jejak Islam Politik; Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI, 2004), Hal. 93.

Sejarah Nahdlatul Ulama

NU yang didirikan pada tahun 1926 di Surabaya (Jawa Timur) adalah sebuah organisasi berbasis pesantren yang berkelompok di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selama penduduk Jepang, organisasi ulama “tradisional” ini bergabung dengan Muhammadiyah sebuah organisasi Islam “reformis” dalam dewan Islam, Masyumi (Majlis Syura Muslim Indonesia). Namun, pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi yang membuat Masyumi menjadi partai politik Islam Moderen dan menjadi partai politik yang independen. Pada pemilihan umum pertama setelah kemerdekaan (1955) NU muncul sebagai salah satu dari empat besar (tiga lainnya adalah Partai Nasional Indonesia/PNI, Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia/PKI). Akibat dari restrukturisasi politik orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, NU menjadi komponen terbesar dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).⁷ Terdapat tiga alasan pokok yang mendasari kesepakatan para ulama tersebut untuk mendirikan organisasi NU, yaitu:⁸

1. Timbulnya keperluan yang mendesak bagi kaum penganut madzhab untuk melembagakan persatuan di antara mereka guna menghadapi pesatnya perkembangan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia khususnya di Pualau Jawa terutama dilancarkan oleh Muhammadiyah. Gerakan pembaharuan yang lain di lakukan oleh Persis dan al-Irsyad, namun intensitas gerakan Muhammadiyah lebih sering menimbulkan pembenturan dengan kaum ahlusunah wal jamaah tersebut.
2. Timbulnya keperluan yang mendesak untuk mengadakan audiensi guna menyampaikan resolusi dari kaum ahlusunah wal jamaah di Indonesia kepada penguasa baru di Saudi Arabia yang dipegang oleh dinasti Suud dari kaum Wahabi.
3. Globalisasi imperialisme fisik konvensional yang di Indonesia di lakukan oleh belanda, Inggris dan Jepang, sebagaimana juga terjadi di belahan bumi Afrika, Asia, dan Amerika Latin, dan negeri-negeri lain yang di jajah bangsa Eropa.⁹

Paham keagamaan NU adalah *Ahlusunah waljama'ah*, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrem *naqli* (skripturalis). Lebih lanjut

“... Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya al-Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi/ Tauhid/ketuhanan. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab: imam Syafi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain: imam Hanafi, imam Maliki, dan imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang empat di bawah.

⁷Taufiq Abdullah, dkk, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LPS3ES, 1988), Hal. 193.

⁸ Mahrus Irsyam, *ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Kritisi*, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1994), Hal. 5-6

⁹ <https:// Mantebzone.blogspot.com.2011/06/latar-belakang-terbentuknya-nahdlatul.html>. Dikutip pada tanggal 20 Juni 2017.

*Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. ...*¹⁰

Masalah utama yang menarik minat Nahdlatul Ulama adalah tetap masalah agama, terutama bila menyangkut dengan pengeluaran fatwa yang didasarkan atas ajaran mazhab, perkembangan dan situasi keadan negara baik sisi pemimpin yang berkuasa. Dengan kenyataannya mazhab Syafi'i yang banyak diikuti, walau ketiga mazhab lain diakui. Sumber pokok persoalan dalam hubungan ini ialah mengenai *ijtihad* (pintu ijtihad) yang masih terbuka ataukah sudah tertutup. Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa ketikan itu bahwa taqlid adalah jawaban yang wajib.

Tujuan, Visi dan Misi Nahdlatul Ulama

Tujuan didirikannya NU adalah untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *Ahlussunnah waljama'ah* dengan menganut salah satu dari mazhab empat (Hanafi, maliki, Syafi'I dan Hambali) serta mempersatukan langkah para ulama beserta pengikut-pengikutnya dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia.¹¹

Visi NU yaitu menjadikan wadah perjuangan ulama dan pengikutnya yang bergerak dalam bidang agama dan sosial kemasyarakatan demi terwujudnya *KhoiruUmmah*.¹² Sedangkan misi NU adalah:

- Dalam bidang agama mengupayakan perlaksanaan ajaran Islam yang menganut faham *Ahlussunnah waljama'ah* dan menurut salah satu mazhab empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah *amarma'rufnahi mungkar*.
- Dalam bidang edukatif, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengakaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk membina umat muslim agar menjadi muslim yang taqwa, berbudi, luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama bangsa dan negara.
- Dalam bidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
- Dalam bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan, kesempatan, berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.
- Dalam bidang usaha lain, mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khoiru Ummah.

Upaya dari visi dan misi ini adalah untuk memperkuat dan mewujudkan jamiyyah Aswaja bagi umat masyarakat yang mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera di tengah-

¹⁰<http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,6-t,pahamkeagamaan-.phpx>, Dikutip pada 1 Desember 2017

¹¹PWNU Jawa Timur, *Aswaja an-Nahdah* (Surabaya: Khalista, 2007), Hal. 1.

¹²*Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, t.th.), Hal. 7.

tengah kehidupan wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Betapapun NU lahir dan berdiri sebagai organisasi keagamaan. Namun yaitu integritas terhadap bangsa, independensi dari kolonialisme, dan hak untuk berkeyakinan. Peduli terhadap persoalan kebangsaan, kritis terhadap kekuasaan dan menjaga hak warga negara untuk tidak mengganggu keberagama dan berkeyakinan.

Hasil Transformasi Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama sering dikatakan sebagai organisasi massa Islam tradisional, hingga dekade 1990-an ini, perjalanan NU telah menunjukkan perkembangan dalam tiga fase dengan ciri-ciri yang berbeda, yaitu:¹³ *pertama*, Fase sebelum kemerdekaan, lebih menekankan pada pengembangan ajaran *Ahlulsunnah wal Jama'ah* melalui pendidikan pesantren. NU sebelum kemerdekaan tampil sebagai organisasi yang disegani oleh penjajah. Alhasilnya kekokohan ulama yang ikut serta dalam NU mampu menjembatani kepentingan Islam dan juga kepentingan bangsa Indonesia yang menjadi pilar pengantar terhadap lahirnya negara kesatuan republik Indonesia.¹⁴

Kedua, NU melibatkan dirinya dalam aksi politik praktis (orde lama dan orde baru). NU memutuskan dirinya menjadi partai politik hanya karena menghadapi komunis, sebab komunis sebagai partai politik membutuhkan pola yang sama (untuk mempertahankan dasar negara Pancasila). Masa orde baru NU mulai kembali sebagai organisasi keagamaan dan setuju untuk mendirikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).¹⁵

Ketiga, Fase kembali ke khittah (masa reformasi). Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momen penting untuk menafsirkan kembali ajaran *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, merumuskan kembali metode berfikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial, serta menjalin keharmonisan kembali hubungan NU dan negara. Gerakan ini berhasil membangkit gairah pemikiran dan dinamikan sosial dalam NU. NU yang tidak lagi terjun dalam politik praktis namun kini mengabdikan dirinya untuk mendorong tumbuh kembangnya masyarakat yang madani (*civic religion*), yaitu masyarakat yang berkeadilan dan berperadaban tinggi.¹⁶

Oleh karena itu bahwa NU merupakan pribumisasi Islam memiliki urgensi terhadap dinamika sosial-kemasyarakatan. Mengadopsi apa yang layak dalam tradisi untuk dikembangkan demi kepentingan masa kini dan masa depan merupakan langkah pemaknaan yang paradigmatis. Karena sebuah transformasi, baik pemikiran maupun sosial, harus beranjak dan menimba inspirasinya dari tradisi. Maka, diperlukan ikhtiar untuk menggali hal-hal dalam tradisi yang bisa mendukung transformasi.

Generasi Muda Nahdlatul Ulama

Generasi muda Nahdlatul Ulama inilah yang memberikan corak pemikiran dan perubahan orientasi NU dalam gerakan sosial sebagai upaya strategi pembaharuan. Sekaligus menjadi gerakan kritik sebagai counter wacana terhadap isu-isu yang berkembang, khususnya yang menyangkut ideologi NU. NU sebagai organisasi Islam tidak

¹³ Asep Gunawan (Ed.), *Artikulasi Islam Kultural; Dari Tahap Moral ke Preiode Sejarah*, Ed. Cet. I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, Hal. 352-353.

¹⁴ Ahmad Ali Riyadi. *Gerakan Pembaharuan Islam Kaum Muda Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia 1990-2005*, (Desertasi: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006, Hal. 219

¹⁵ Fajar Arif Dharmawan, *Pengaruh Nahdlatul Ulama (NU)...*, Hal. 26.

¹⁶ Rahmi Hasfi Febrina, dkk. *Nahdlatul Ulama: Bebas Untuk Oportunis? Menelisik Kontestasi politik pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bayumas Periode 2008 dan 2013*, (Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Volum 18, No 2, November 2014, ISSN 1410-4946), Hal. 100.

hanya terjebak pada persoalan-persoalan teologis semata namun juga memiliki komitmen terhadap problematika sosial politik dimana tema-tema yang diusung oleh kaum muda NU lebih menekankan terhadap problem-problem kemanusiaan kontemporer melalui penelusuran doktrin, sejarah, dan kajian kontemporer untuk menemukan makna Islam yang mampu menjawab persoalan kemanusiaan sebagai upaya kontekstualisasi pemahaman agama yang diimplementasikan ke dalam gerakan pengembangan masyarakat dengan pendekatan praktis dan teoritis. Dimana di tataran teoritis mereka membangun teori-teori alternatif dengan apa yang disebut Islam kritis, Islam emansipatoris, Islam liberal, dan Islam progresif.¹⁷

Perubahan zaman membuat situasi berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda pula. Pada era kemerdekaan NU memiliki barisan Hisbullah yang dipimpin oleh H Zainul Arifin. Sekarang NU semestinya memiliki 'barisan perang modern' berbasis pada penguasaan teknologi informasi yang canggih dan kekuatan ekonomi umat yang kokoh, dalam rangka melakukan *adjuvment* terhadap pertarungan geopolitik AS dan Cina di Asia Pasifik.¹⁸

Secara internal generasi muda NU bahkan seperti mengalami 'stagnasi pemikiran'. Pada saat yang sama, belum menemukan visi besar generasi muda NU, terkait bagaimana peran dan kontribusi NU terhadap Indonesia dalam konteks percaturan global. Nu sebagai organisasi yang memiliki generasi millennial berlimpah, tentu memiliki peran sangat strategis dalam upaya mewujudkan Indonesia emas 2045 tersebut. Patut disyukuri, saat ini peluang anak-anak muda NU untuk tumbuh semakin luas seiring persebaran mereka secara merata di berbagai fakultas terbaik di negeri ini dan luar negeri.¹⁹

Transformasi politik yang mengiringi gerakan kaum muda NU, mereka concern di jalur kultural dan berkiprah dengan mengusung wacana pemikiran dan gerakan-gerakan politik yang mengarah pada pemberdayaan *Civil Society* dan penguatan gerakan politik keagamaan dalam NU antara lain, SDM NU semakin meningkat ditandai lahirnya para sarjana-sarjana yang memiliki latar belakang NU yang cukup kental, di samping proses kreatif kaum muda NU yang berkiprah di jalur kultural. Mereka sangat peka-sensitif terhadap berbagai wacana yang berkembang serta kontribusinya dalam mengembangkan dan memberdayakan *Civil Society* patut diperhitungkan.²⁰

Munculnya berbagai lembaga swada masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang keagamaan juga berpengaruh bagi generasi muda NU. LSM juga tidak hanya menggiatkan kehidupan keagamaan, tetapi juga berperan aktif dalam membangun wacana progresif-kritis. Aktivitas LSM yang ditekuni diantaranya adalah yang bersentuhan dengan realitas sosial, yaitu: Lakpesdam NU, P3M, LKIS, Syarikat, Puspek Avveroes, Lapar, Incres, KKPS dan lain-lain.²¹

¹⁷ Ahmad Ali Riyadi. *Gerakan Pembaharuan Islam Kaum Muda Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia 1990-2005*. (Desertasi, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006, Hal. 219

¹⁸ Ahmad Ali Riyadi. *Gerakan Pembaharuan Islam...*, Hal. 220

¹⁹ Herry Haryanto Azumi, *Transformasi NU Untuk Indonesia*, Diakses dari <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/01/31/pecf400-transformasi-nu-untuk-Indonesia>. Diakses pada tanggal 07 Juli 2018.

²⁰ Firdaus Muhammad, *Dinamikan Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama*, (Kalam.: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol 9, no 1, 1 Juni 2015), Hal. 64

²¹ Diakses dari www.nu.or.id/post/read/14706/nu-progresif-menembus-batas-tradisi. Dikutip pada tanggal 07 Juli 2018

Alhasilnya perkembangan teknologi membuat para anak-anak muda muslim melakukan perubahan. Salah satunya adalah komunitas *One Day One Juz* (ODOJ)²² termasuk komunitas dakwah online yang bisa membuktikan bahwa komunitas yang berbasis online -acapkali disebut sebagai komunitas yang semu- mampu menunjukkan eksistensinya dengan memberikan kontribusi nyata di masyarakat. Menggunakan sarana teknologi komunikasi online, komunitas ini menginisiasi gerakan sosial spiritual yang memotivasi Muslim Indonesia untuk membiasakan diri berinteraksi dengan Al-Qur'an setiap hari, mampu memobilisasi ribuan umat Muslim untuk mengikuti program tilawah berjamaah, dan menjaga komunikasi berkelanjutan sesama anggotanya. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa peran generasi muda Muslim Komunitas ODOJ dalam gerakan sosial spiritual *One Day One Juz* adalah sebagai inisiator, organisator, donatur, motivator, dan pemonitor.²³

Usaha di Bidang Ekonomi

NU selain melakukan gerakan keagamaan, juga membuat gerakan di bidang perekonomian Pada tahun 1938-1939. Gerakan itu disebut *Moment-actie* atau disebut dengan Gerakan Mabadi Khairo Ummah yang mengarah pada semangat tolong-menolong (Mu'awanah) di lapangan ekonomi bangsa, dengan meningkatkan pendidikan moral yang bertumpu pada tiga prinsip, yaitu jujur (*shidq*), dapat dipercaya (*amanah*) serta tolong-menolong (*at-ta'awun*).²⁴ Apabila basis dan simpul-simpul kemandirian ekonomi tidak dibangun, selain para ulama telah berdosa, bangsa ini juga akan terus terpuruk dalam kemiskinan, kemaksiatan, dan kebodohan akibat dari kuatnya pengaruh kolonial.

Saat ini warga NU menjadi kaum mayoritas di Indonesia yang berada di daerah pedesaan. Kemiskinan lebih banyak terjadi di pedesaan maka secara otomatis warga miskin Indonesia yang paling dominan secara kuantitas adalah warga NU. Karena itulah, NU seyogianya segera melakukan konsolidasi menyangkut program pemberdayaan ekonomi. Agenda ini tidak bisa ditunda-tunda sebab kondisi sosio-ekonomi masyarakat semakin terpuruk dan terancam memburuk dengan krisis global yang terjadi dan dibukanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan AFTA.²⁵

Merajalela praktik ekonomi kapitalis yang didasarkan pada kompetisi dan pasar bebas. Karena itu, sudah saatnya bagi NU dan warganya menjelang usia satu abad

²² Gerakan sosial spiritual yang diinisiasi net generation dan memanfaatkan teknologi informasi salah satunya adalah komunitas dakwah online yang bernama Komunitas *One Day One Juz* (ODOJ). Komunitas ini diinisiasi oleh generasi muda Muslim yang peduli dengan dakwah di masyarakat. Mereka memanfaatkan instant messaging untuk perekrutan, koordinasi, dan komunikasi anggota komunitas. Kemajuan teknologi komunikasi yang membuka peluang setiap orang untuk bisa berkomunikasi bahkan secara serentak bersama-sama sangat memudahkan proses interaksi dan komunikasi anggota-anggota komunitas *online* ini. Selain interaksi *online*, komunitas ini juga menunjukkan eksistensinya melalui acara-acara *offline* yang bisa mempertemukan anggota komunitas dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum (Puji Hariyanti, *Generasi Muda Muslim dan Gerakan Sosial Spiritual Berbasis Media Online*, (Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 13, No 2, Desember 2016), Hal.166. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/313828684>. Dikutip tanggal 08 Juli 2018)

²³ Puji Hariyanti, *Generasi Muda Muslim ...*, Hal. 177

²⁴ Titut Sudiono, *Sketsa Pemikiran Ekonomi NU Dan NU Ekonomi (Bagian Dua)*, diakses dari <http://nu-lampung.or.id/blog/sketsa-pemikiran-ekonomi-nu-dan-nu-ekonomi-bagian-dua.html>. Dikutip pada tanggal 13 Mei 2017.

²⁵ R. Andi Irawan . *Etos Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nu* (Jurnal, Epistemé, Vol. 11, No. 1, Juni 2016), Hal 158. Diakses dari <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/103/94>. Di kutip tanggal 08 Juli 2018.

melakukan gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara masif menumbuhkan etos kerja masyarakat untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi ekonominya. Mulai dari penataan manajemen organisasi, konsolidasi kaderisasi hingga bagaimana menghadapi isu dan gerakan-gerakan radikalisme serta bagaimana memaksimalkan peran dan agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat *Nahdliyin*.²⁶

Maka dari itu tindakan untuk melawan kehidupan global yang menjadikan ekonomi sebagai fondasi kehidupan, masyarakat *Nahdliyin*²⁷ perlu mendapat pencerahan, arahan dan landasan tentang praktik perekonomian yang islami. Hal penting agar semua aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat sesuai dan sejalan dengan ajaran al-Qur'an. Dengan demikian kemandirian ekonomi warga NU dapat tercapai dan senantiasa dalam ajaran Islam yang diridai Allah Swt.

Usaha di Bidang Sosial-Kemasyarakatan

Kegiatan sosial kemasyarakatan NU di bidang pendidikan sangat terlihat adalah dengan adanya pesantren pada fase awal berdirinya NU. Tujuannya tidak lain adalah menanamkan pendidikan agama dan memberikan cakrawala pengetahuan bagi kalangan pribumi di masa kolonialisme Belanda. Hingga kemudian untuk menjawab perkembangan jaman yang menuntut NU untuk membentuk sebuah sistem pendidikan yang memiliki struktur formal, maka berdirilah lembaga pendidikan Maarif dan pondok pesantren dibina oleh *Rabithah Maahid Al Islamiya* (RMI). Kemudian pada tahun 1997 telah didirikan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) sebagai kelanjutan dari program Muslimat NU yang lebih dulu bergerak mengurus masalah kependudukan sejak tahun 1969. Program-program LKKNU terutama ditujukan pada warga NU dan lembaga-lembaga yang dimilikinya untuk merealisasikan maksudnya sebagaimana telah tersebut di atas, maka LKKNU kemudian menyelenggarakan lokakarya tentang KB dan kependudukan di pesantren-pesantren. Pelatihan para penyuluh KB yang sesuai dengan syariat agama Islam dan pelatihan guru, serta mengadakan studi banding tentang pengembangan KB ke luar negeri seperti, Mesir, Tunisia, Turki dan Filipina.²⁸

Kegiatan sosial-kemasyarakatan NU mulai menemukan signifikansinya pasca Mukhtar di Situbondo tahun 1984. Pada saat itu, muncul kader-kader muda NU seperti Abdurrahman Wahid, Fahmi Saifuddin, dan Mustofa Bisri.²⁹ Refleksi perubahan tersebut diimplementasikan dalam bentuk produk baru seperti fiqh perempuan yang muncul dalam merespon isu gender yang muncul di Barat. Tidak kalah pentingnya adalah pemikiran Gus Dur mengenai paham pluralism dimana kemudian muncul gerakan-gerakan Islam toleran dan Islam liberal.

Menurut A. Sunarto A.S. ada dua alasan pokok yang dikemukakan oleh Gusdur terkait pribumisasi Islam. *Pertama*, alasan historis bahwa pribumisasi Islam merupakan bagian dari sejarah Islam. Baik di negeri asalnya maupun negeri lain termasuk Indonesia. *Kedua*, proses pribumisasi Islam berkaitan erat antara fikih dengan adat. Menurutnya, adat

²⁶ *ibid.*

²⁷ Arti kata "*Nahdliyin*" - Istilah Politik adalah warga masyarakat yang berafiliasi atau sebagai anggota ormas NU (nahdlatul ulama), diakses dari <https://kamuslengkap.com/kamus/politik/arti-kata/nahdliyin>. Di Kutip tanggal 08 Juli 2018

²⁸ <http://aswajanu86.blogspot.co.id/2015/09/peranan-nahdlatul-ulama-dalam-bidang.html>

²⁹ *Ibid.*

tidak mengubah nash, melainkan hanya mengubah atau mengembangkan implementasinya agar lebih fleksibel.³⁰

Langkah NU mengembangkan paradigma baru politik moral-kebangsaan untuk menjaga keutuhan bangsa cukup bijak, sebagai implementasi khittah NU 1926 dengan membentangkan garis demokrasi antara gerakan kultural NU dengan politik praktis.³¹

NU dan Politik

Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang sangat besar dan entu saja punya gaung di pentas nasional, NU kadang harus merespon persoalan-persoalan politik. Hal ini tampaknya merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa bersikap cuek terhadap persoalan-persoalan krusial, yang kadang berda di wilayah politik. Yang pasti, setelah memutuskan kembali kekhittahnya, NU tidak secara formal memposisikan diri sebagai organisasi politik. Sesekali merespon persoalan politik, tentu masih merupakan hal yang wajar, asal tidak mengganggu peran lainnya yang jauh lebih penting, yakni peran sosial kemasyarakatan dan keagamaan.³²

Menurut KH. Ahmad Mustofa Bisri, setidaknya ada 3 jenis politik dalam pemahaman NU, yaitu politik kebangsaan, politik kerakyatan dan politik kekuasaan. NU sejak berdiri memang melakukan aktivitas politik, terutama dalam pengertian yang pertama, yakni politik kebangsaan, karena NU sangat berkepentingan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nampak tilas gerakan NU diawali dengan munculnya ideologi Pancasila sebagai pondasi bangsa Indonesia. Peranan NU termuat dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Peta politik NU kemudian dilanjutkan dengan berubahnya NU menjadi partai politik di tahun 1955 setelah sebelumnya bergabung dengan Masyumi bersama organisasi Islam lainnya. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai yang mendukung Sukarno, dan bergabung dalam NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) Nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI) Agama Partai Nahdhatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah itu NU maju ke panggung politik praktis bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).³³

Maksud dari politik kerakyatan adalah politik ini yang jarang dijalankan oleh orang-orang NU. Politik kerakyatan itu politik membela rakyat. Misalnya kalau menjadi anggota dewan harus betul-betul menjadi wakil rakyat, jangan mewakili diri sendiri.

Adapun pemahaman dalam politik kekuasaan muncul di era reformasi yang menjadi tanda berakhirnya kekuasaan pemerintahan orde baru merupakan sebuah momentum bagi NU untuk melakukan pembenahan diri. Selama rezim orde baru berkuasa, NU cenderung dipinggirkan oleh penguasa saat itu. Ruang gerak NU pada masa orde baru juga dibatasi, terutama dalam hal aktivitas politiknya. Pada masa reformasi inilah peluang NU untuk memainkan peran pentingnya di Indonesia kembali terbuka. NU yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, pada awalnya lebih memilih sikap netral menjelang mundurnya Soeharto. Namun sikap ini kemudian berubah, setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan sebuah pandangan untuk merespon proses reformasi yang berlangsung di Indonesia, yang dikenal dengan Refleksi.³⁴

³⁰ A. Sunarto AS, *Jurnal Sosiologi Islam*, (Vol. 3, No.2, Oktober 2013, ISSN: 2089-0192) Hal. 57.

³¹ Firdaus Muhammad, *Dinamikan Pemikiran...*, Hal. 69

³² A. Qodri A. Azizy, dkk. *Jejak-jejak Islam Politik...*, Hal. 73

³³ Delian Noer, *Gerak Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980), Hal, 235.

³⁴ M, Mukhsin Jamil, dkk, *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, dan NU*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Im, Depertemen Agama Republik Indonesia, 2007), Hal. 319.

Transformasi di sektor politik bertujuan menciptakan politik yang stabil. Semua usaha di sektor politik ditujukan bagi terbentuknya sistem politik yang meliputi perubahan lembaga, peranserta tingkah laku, norma dan nilai yang semuanya berlaku di masa-masa lalu. Salah satu bentuk politik yang diberi nama fusi memiliki tiga tujuan yang ingin dicapai, yaitu:³⁵

1. Pergantian lembaga politik lama khususnya parpol dengan lembaga politik baru atau parpol baru.
2. Menghendaki pembatasan yang tegas antara pelembagaan peran di wilayah politik dengan pelembagaan peranan di wilayah non politik.
3. Menginginkan perubahan nilai-nilai normalama dengan nilai dan norma baru.

Inti dari kesemuaan ini dapat dipahami bahwa dalam konteks politik dan masyarakat kontemporer saat ini, pelaksanaan peran politik NU seyogyanya tidak meninggalkan fungsi sosialnya sebagai ormas keagamaan di negara Indonesia. Mengabaikan fungsi ini berarti mengingkari khittah 1926 tetapi juga membuat rampuhnya bangunan peran politik NU sendiri. Alhasilnya, fungsi sosial NU adalah landasan keorganisasian NU sebagai organisasi keagamaan, sedangkan perannya dalam politik sebagai upaya menjaga dan melindungi tatanan sosial kemasyarakatan, yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam Ahlulsunnah wal Jama'ah.

Kontraversi NU dalam Berpolitik

Kelebihan dari organisasi NU yaitu mampu mengkonsentrasikan diri untuk mengurus persoalan-persoalan umat di bidang sosial, masyarakat, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, ekonomi, keagamaan, dan sebagainya, yang mungkin lebih fundamental dalam hidup. Adapun kelemahan dari pada NU sebagai organisasi politik tidak mempunyai peran yang signifikan untuk turun mengarsiteki perubahan politik dan pergantian aktor-aktor kekuasaan dan elit-elit politik secara langsung. Padahal aktor kekuasaan dan elit politik, selalu punya posisi yang strategis dan dominan dalam perjalanan sejarah bangsa, yang sering kali punya kekuatan untuk mengarahkan dan mendesain sejarah bangsa.³⁶

Berbeda dengan para ilmuwan lainnya, terutama kaum modernis, yang mengambil kesimpulan bahwa NU merupakan partai sekaligus organisasi keagamaan yang oportunis dan tidak berprinsip, khususnya pada rentang masa 1952-1967, maka Greg Fealy melihat NU justru selalu konsisten berpegang pada ideologi politik keagamaan yang sudah lama dianutnya. Yakni mendasarkan diri pada fiqih Sunni klasik yang meletakkan prioritas tertinggi pada perlindungan terhadap posisi Islam dan para pengikutnya (umat). Oleh karena itu, para elit NU selalu bersikap hati-hati, luwe, tidak berlebihan, kebalikan dari Masyumi yang akhirnya difitnah dan dibubarkan dan memilih jalan tengah. Jalan tengah ini tentu saja tidak begitu membahayakan dibandingkan dengan sikap memusuhi dan konfrontasi.³⁷

³⁵ Mahrus Irsyam, *ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Kritis*, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1994), Hal. 49-45.

³⁶ A. Qodri A. Azizy, dkk. *Jejak-jejak Islam Politik...*, Hal. 73

³⁷ Sudarso Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), Hal. s363.

Jalan yang ditempuh NU selalu mengacu kepada pencapaian masalah (kemaslahatan, mengejar kemanfaatan) dan menjauh mafsadah (kerugian-kerusakan). Prinsip politik NU yang mengutamakan kemaslahatan, keselamatan dan kesejahteraan umat ini sangat jarang dijadikan rujukan. Para pengamat terutama kaum modernis lebih suka melihat secara sekilas perilaku elit politik NU, kemudian menjustifikasi, itulah NU yang oportunistis, tidak berprinsip, dan mencari selamatnya sendiri. Misalnya bermula pada tahun 1953, ketika NU tiba-tiba berpisah dari barisan Masyumi dan bergabung dengan partai nasional dan partai kiri dalam bentuk kabinet Ali Sastroamidjojo. Pembalikan sikap yang paling dramatis terjadi pada masa transisi menuju demokrasi terpimpin antara 1957 dan 1960, ketika partai NU mula-mula menolak, kemudian menerima, usulan-usulan Presiden Soekarno dan tentara untuk tidak lagi memberlakukan demokrasi konstitusional. Pembalikan haluan kebijakan pokok yang terakhir dalam periode ini adalah ketika NU meninggalkan Soekarno pada tahun 1967 untuk mendukung rezim Orde Baru Soeharto.³⁸ Sebaliknya juga dengan keadaan bangsa Indonesia yang sangat memprihatinkan, sedih dan menakutkan di masa sekarang ini, misalnya persoalan yang terjadi baru-baru ini di Indonesia yakni kasus Basuki yang dikenal dengan sebutan (ahok), mencoba menista al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51. Ada salah satu tokoh NU membela dan menyatakan tidak salah serta ikut serta sebagai saksi di pengadilan untuk membela Ahok.

Oleh karena itu sebagaimana fenomenal organisasi keagamaan mana pun baik di Indonesia atau pun dunia, NU juga mengalami sejumlah cacat, misalnya: memiliki oknum pengejar kepentingan pribadi, pejabat dan koruptor yang beberapa diantaranya adalah ulama senior. Namun terlepas dari itu kehadiran para oportunistis dan koruptor tersebut di tubuh NU, sebagian besar para pemimpin dan anggota partai NU masih dimotivasi oleh kepentingan agama. Walaupun NU adalah teks yang kaya corak, warna dan kaya akan nuansa, serta memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Upaya NU untuk memberdayakan masyarakat melalui jalur kultural ini didedikasikan sebagai penguatan civil society, sehingga NU baik sebagai jam'iyah (organisasi) maupun jama'ah (komunitas) turut menciptakan negara-bangsa yang kondusif, lebih religius, damai dan demokratis.

Kesimpulan

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam tradisional menunjukkan bahwa pribumisasi Islam memiliki urgensi terhadap dinamika sosial-kemasyarakatan. Mengadopsi apa yang layak dalam tradisi untuk dikembangkan demi kepentingan masa kini dan masa depan merupakan langkah pemaknaan yang paradigmatis. Karena sebuah transformasi, baik pemikiran maupun sosial, harus beranjak dan menimba inspirasinya dari tradisi. Maka, diperlukan ikhtiar untuk menggali hal-hal dalam tradisi yang bisa mendukung transformasi. Baik dalam bidang ekonomi, sosial masyarakat, ekonomi dan politik.

Upaya dari visi dan misi ini adalah untuk memperkuat dan mewujudkan jamiyyah Aswaja bagi umat masyarakat yang mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera di tengah-tengah kehidupan wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.

³⁸ A. Qodri A. Azizy, dkk. *Jejak-jejak Islam Politik...*, Hal. 95

Betapapun NU lahir dan berdiri sebagai organisasi keagamaan. Namun yaitu integritas terhadap bangsa, independensi dari kolonialisme, dan hak untuk berkeyakinan. Peduli terhadap persoalan kebangsaan, kritis terhadap kekuasaan dan menjaga hak warga negara untuk tidak mengganggu keberagama dan berkeyakinan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Taufiq, dkk, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LPS3ES, 1988.
- A. Qodri A. Azizy, dkk. *Jejak-jejak Islam Politik; Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia*, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2004.
- Azumi, Herry Haryanto, *Transformasi NU Untuk Indonesia*, Diakses dari <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/01/31/pecfr400-transformasi-nu-untuk-indonesia>. Diakses pada tanggal 07 Juli 2018.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, t.th.
- Dharmawan, Fajar Arif *Pengaruh Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Eksistensi Pendidikan Islam Formal di Masyarakat Gendangan Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi, Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.
- Febrina, Rahmi Hasfi, dkk. *Nahdlatul Ulama: Bebas Untuk Oportunis? Menelisik Kontestasi politik pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bayumas Periode 2008 dan 2013*, Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Volum 18, No 2, November 2014, ISSN 1410-4946.
- Gunawan, Asep, dkk, *Artikulasi Islam Kultural; Dari Tahap Moral ke Preiode Sejarah*, Ed. Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Haidar, Ali M, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1994.
- Hariyanti Puji, *Generasi Muda Muslim dan Gerakan Sosial Spiritual Berbasis Media Online*, (Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 13, No 2, Desember 2016).
- Irawan, R. Andi. *Etos Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nu*, Jurnal, Epistemé, Vol. 11, No. 1, Juni 2016.
- Irsyam, Mahrus, *ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Kritisi*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1994.

Jamil, M, Mukhsin. *Nalar Islam Nusantara Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, dan NU*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam , Direktorat Jenderal Pendidikan Im, Depertemen Agama Republik Indonesia, 2007.

Muhammad, Firdaus, *Dinamikan Pemikiran dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama*, (Kalam,: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol 9, no 1, 1 Juni 2015.

Noer, Delian *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.

PWNU Jawa Timur, Aswaja an-Nahdah, Surabaya: Khalista, 2007.

Riyadi, Ahmad Ali. *Gerakan Pembaharuan Islam Kaum Muda Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia 1990-2005*. Desertasi, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006.

Shobron, Sudarso. *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.

Sudiono, Titut *Sketsa Pemikiran Ekonomi NU Dan NU Ekonomi (Bagian Dua)*, diakses dari <http://nu-lampung.or.id/blog/sketsa-pemikiran-ekonomi-nu-dan-nu-ekonomi-bagian-dua.html>. Dikutip pada tanggal 13 Mei 2017.

Sunarto, A. *Paradikma Nahdlatul Ulama Terhadap Modernisasi*, Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3, No.2, Oktober 2013, ISSN: 2089-0192.

Ummatin, *Sejarah Islam dan Budaya Lokal; Kearifan Islam atas Tradisi Masyarakat*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015

<https://Mantebszone.blogspot.com.2011/06/latar-belakang-terbentuknya-nahdlatul.html>. Dikutip pada tanggal 20 Juni 2017.

<http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,6-t,pahamkeagamaan-.phpx>, Dikutip pada 1 Desember 2017.

www.nu.or.id/post/read/14706/nu-progresif-menembus-batas-tradisi. Dikutip pada tanggal 07 Juli 2018.

<https://kamuslengkap.com/kamus/politik/arti-kata/nahdliyin>. Dikutip tanggal 08 Juli 2018.

<http://aswajanu86.blogspot.co.id/2015/09/peranan-nahdlatul-ulama-dalam-bidang.html>.